

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017-2019**

Vitalis Ari Widiyaningsih¹, Margaretha Prihatiningsih²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pignatelli Surakarta

Email: vitalisariw@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Surakarta periode 2017-2019 dan mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Surakarta periode 2017-2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun 2017-2019. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Surakarta secara umum dikatakan baik. Kinerja Pendapatan baik dilihat dari Varians Pendapatan Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Surakarta secara umum dapat dikatakan baik. Kinerja Belanja baik dilihat dari Varians Belanja Daerah, Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Keserasian Belanja.

Kata Kunci: anggaran pendapatan, anggaran belanja, APBD, kinerja keuangan

Abstract : This study aims to determine the Financial Performance of Surakarta City's Regional Revenue for the 2017-2019 period and find out the Financial Performance of Surakarta City's Regional Expenditure for the 2017-2019 period. This research is a quantitative descriptive study, namely research that seeks to describe the current problem solving using numbers, starting from data collection, interpretation of the data and the appearance of the results. Data collection techniques used in this study using documentation techniques. The data used is secondary data in the form of the Surakarta City Regional Budget Realization Report for 2017-2019. The expected results of this study indicate that the Financial Performance of Surakarta City's Regional Revenue is generally said to be good. Revenue performance is good as seen from the Regional Income Variance, Regional Income Growth, Regional Income Financial Ratios seen from the Degree of Decentralization, Regional Financial Dependence Ratio, Effectiveness and Efficiency Ratio of Regional Taxes, and the Degree of BUMD Contribution. In general, the performance of the Surakarta Regency Government's Regional Expenditure Financial Performance can be said to be good. Expenditure performance is good as seen from the Regional Expenditure Variance, Regional Expenditure Growth, and Shopping Harmony.

Keywords: revenue budget, expenditure budget, APBD, financial performance

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas kepada masyarakat atas kinerja pemerintah baik di pusat maupun daerah menjadi suatu tuntutan yang umum. Tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik Soimah (2014). Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai kinerja pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia pada tahun 2016 secara kuantitatif hanya sebesar 49,87. Rendahnya tingkat kinerja akuntabilitas pemerintah daerah disebabkan oleh empat masalah utama, yakni sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan teratur, kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan masalah, serta perincian kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kegiatan.

Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 44,04 km², yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 (lima puluh satu) kelurahan, 606 (enam ratus enam) Rukun Warga serta 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) Rukun Tetangga. Dalam LKPJ, wali kota menyampaikan pada 2019, beberapa kebijakan nasional dan regional berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penurunan Realisasi PAD Dipertanyakan. penurunan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta dengan realisasi sebesar 96,17 persen. Realisasi PAD ini menurun dibandingkan pada tahun anggaran 2018 sebesar 100,61 persen. Realisasi PAD itu bersumber dari realisasi pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah terealisasi sesuai yang direncanakan. Hal ini menjadikan alasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian ini pada pemerintahan Kabupaten Surakarta. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017-2019”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Suharsimi (2002), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Surakarta dengan mengambil data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pengambilan data di tempat yang tertera di atas dengan tujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta selama periode 2017-2019. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, oleh karena itu subjek pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Surakarta tahun 2017-2019.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan dokumentasi. Data diperoleh

dari kantor BAPPEDA Kota Surakarta berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2017--2019 dan data biaya pemungutan pajak tahun 2017-2019 dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).

Definisi dan Pengukuran Variabel

Analisis Kinerja Pendapatan

$$a. \text{ Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

$$b. \text{ Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan tahun } (t-1)} \times 100\%$$

$$c. \text{ Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$d. \text{ Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$e. \text{ Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$f. \text{ Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$g. \text{ Derajat Kontribusi BUMN} = \frac{\text{Pendapatan Bagian Laba BUMN}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Kinerja Belanja

$$a. \text{ Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

$$b. \text{ Pertumbuhan Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

$$c. \text{ Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$d. \text{ Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total belanja Daerah}}$$

$$e. \text{ Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Analisis Varians Pendapatan

Berdasarkan tabel 1 di bawah, secara umum dilihat dari Analisis Varian Pendapatan Daerah Kota Solo dapat dikatakan tidak baik. Analisis Varian Pendapatan daerah Kota Surakarta yang mengalami selisih yang diharapkan hanya di akhir bulan setiap tahunnya. Jika dilihat setiap bulannya tidak mengalami selisih yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 50%. Persentase

tertinggi yaitu pada akhir tahun 2018 sebesar 100,61%, sedangkan persentase terendah pada bulan pertama tahun 2019 sebesar 8,57%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan periode 2017 – 2019

Dari tabel 2 di bawah, kinerja keuangan pendapatan daerah dilihat dari analisis pertumbuhan daerah kota Surakarta tahun 2017-2019 dikatakan mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan rata – rata pertumbuhan yang positif yaitu 0,23%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017.

Derajat Desentralisasi

Berdasarkan tabel 3 dibawah dapat dikatakan bahwa Derajat Desentralisasi kota Surakarta tahun 2017-2019 tinggi yaitu diatas 5%. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 Yaitu 24,09%, sedangkan Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2019 Yaitu 23,81%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.

Tabel 1
Varians Pendapatan Daerah

BULAN	2017	2018	2019
	Analisis Varian Pendapatan Daerah	Analisis Varian Pendapatan Daerah	Analisis Varian Pendapatan Daerah
1	9.17%	8.85%	8.57%
2	14.66%	14.18%	13.60%
3	27.04%	24.25%	22.64%
4	34.74%	33.39%	31.82%
5	41.50%	40.85%	38.76%
6	50.85%	51.28%	48.35%
7	60.74%	58.86%	56.90%
8	69.20%	66.99%	65.11%
9	76.88%	77.01%	77.42%
10	85.56%	84.07%	85.40%
11	92.23%	93.69%	92.95%
12	100.33%	100.61%	97.17%
Total	662,91%	654,03%	638,70%
Rata-rata	55,24%	54,50%	53,22%

Sumber: data diolah tahun 2020

Tabel 2
Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun	Bulan	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan	Rata - rata
2017	1	160,909,324,389	160,232,594,818	(676,729,571)	-0.42%	- 1.38%
	2	258,031,754,375	257,231,509,203	(800,245,172)	-0.31%	
	3	463,593,794,718	419,753,122,595	(43,840,672,123)	-9.46%	
	4	591,198,981,898	575,667,880,650	(15,531,101,248)	-2.63%	
	5	700,923,521,895	692,428,913,941	(8,494,607,954)	-1.21%	
	6	885,225,067,580	879,030,312,776	(6,194,754,804)	-0.70%	
	7	1,026,222,989,667	1,005,311,499,177	(20,911,490,490)	-2.04%	

Tahun	Bulan	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan	Rata - rata
	8	1,156,468,106,355	1,136,921,192,459	(19,546,913,896)	-1.69%	
	9	1,358,718,598,969	1,366,749,870,869	8,031,271,900	0.59%	
	10	1,496,633,198,782	1,491,635,576,706	(4,997,622,076)	-0.33%	
	11	1,624,036,364,043	1,652,000,748,440	27,964,384,397	1.72%	
	12	1,733,226,398,427	1,731,961,635,753	(1,264,762,674)	-0.07%	
2018	1	160,232,594,818	166,348,538,301	6,115,943,483	3.82%	1.46%
	2	257,231,509,203	264,727,676,139	7,496,166,936	2.91%	
	3	419,753,122,595	416,459,255,427	(3,293,867,168)	-0.78%	
	4	575,667,880,650	575,903,117,624	235,236,974	0.04%	
	5	692,428,913,941	691,738,192,092	(690,721,849)	-0.10%	
	6	879,030,312,776	871,992,467,241	(7,037,845,535)	-0.80%	
	7	1,005,311,499,177	1,028,799,447,656	23,487,948,479	2.34%	
	8	1,136,921,192,459	1,168,171,011,000	31,249,818,541	2.75%	
	9	1,366,749,870,869	1,387,756,670,998	21,006,800,129	1.54%	
	10	1,491,635,576,706	1,532,118,238,075	40,482,661,369	2.71%	
	11	1,652,000,748,440	1,662,706,813,278	10,706,064,838	0.65%	
	12	1,731,961,635,753	1,773,680,483,102	41,718,847,349	2.41%	
2019	1	166,348,538,301	172,372,028,899	6,023,490,598	3.62%	-
	2	264,727,676,139	279,745,923,968	15,018,247,829	5.67%	
	3	416,459,255,427	453,735,952,786	37,276,697,359	8.95%	
	4	575,903,117,624	567,096,832,210	(8,806,285,414)	-1.53%	
	5	691,738,192,092	673,585,619,768	(18,152,572,324)	-2.62%	
	6	871,992,467,241	858,105,088,621	(13,887,378,620)	-1.59%	
	7	1,028,799,447,656	964,802,684,017	(63,996,763,639)	-6.22%	
	8	1,168,171,011,000	1,094,024,008,369	(74,147,002,631)	-6.35%	
	9	1,387,756,670,998				
	10	1,532,118,238,075				
	11	1,662,706,813,278				
	12	1,773,680,483,102				

Tabel 3
Derajat Desentralisasi

Bulan	2017	2018	2019
	Derajat Desentralisasi	Derajat Desentralisasi	Derajat Desentralisasi
1	12.13%	13.44%	14.48%
2	16.30%	21.26%	19.14%
3	22.44%	24.54%	21.46%
4	23.51%	23.15%	22.17%
5	23.75%	23.64%	22.79%
6	26.34%	24.19%	25.16%
7	25.05%	24.82%	25.33%
8	25.30%	25.32%	25.96%
9	28.04%	26.91%	27.41%

Bulan	2017	2018	2019
	Derajat Desentralisasi	Derajat Desentralisasi	Derajat Desentralisasi
10	27.11%	26.96%	27.03%
11	27.74%	26.90%	26.66%
12	29.24%	27.95%	28.06%
	23.91%	24.09%	23.81%

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada dibawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Berikut ini merupakan tabel perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah:

Tabel 4
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

BULAN	2017	2018	2019
	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
1	87.87%	86.56%	85.52%
2	83.70%	78.74%	80.86%
3	69.64%	66.83%	70.05%
4	68.85%	68.90%	68.22%
5	68.40%	67.06%	66.56%
6	65.18%	65.27%	62.18%
7	64.62%	64.69%	63.04%
8	64.00%	64.07%	62.25%
9	61.87%	62.26%	59.95%
10	62.46%	62.37%	60.80%
11	62.12%	61.52%	61.16%
12	58.10%	58.06%	57.06%
	68.07%	67.19%	66.47%

Sumber: data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Surakarta tahun 2017-2019 rata – rata yang ditunjukkan dengan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 67%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 68,07% sedang tingkat ketergantungan keuangan daerah terendah terjadi di tahun 2019 Yaitu 66,47%. Hal ini menunjukkan terdapat sedikit ketergantungan daerah kota Surakarta terhadap pemerintahan pusat atau pemerintah propinsi.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%, sedangkan rasio efisiensi pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Berikut tabel perhitungan rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah kota Surakarta:

Tabel 5
Rasio Efektivitas Pajak Periode 2017 - 2019

BULAN	2017	2018	2019
	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah
1	5.24%	5.34%	5.53%
2	11.98%	12.62%	11.42%
3	20.09%	22.75%	18.14%
4	29.33%	31.82%	178.95%
5	37.78%	41.33%	33.69%
6	44.95%	47.78%	41.65%
7	54.05%	58.77%	52.35%
8	66.63%	71.54%	64.08%
9	79.46%	78.79%	80.47%
10	87.26%	86.90%	88.76%
11	95.86%	95.46%	96.17%
12	108.58%	106.23%	102.73%
	53.44%	54.95%	64.50%
Rata – rata 57,63%			

Berdasarkan tabel diatas rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%. Pada tahun 2017 menunjukkan angka 53,44% berarti pada tahun ini penerimaan pajak daerah tidak sesuai target yang dianggarkan. Tahun 2018, pada tahun ini penerimaan daerah masih kurang baik karena dalam perbandingan antara penerimaan dan target menunjukkan angka 54,95% masih belum memenuhi syarat minimal 100%, begitu juga untuk tahun 2019 masih di bawah 100% yaitu sebesar 64,50%. Jika dilihat secara umum, rata-rata rasio efektivitas 3 periode tersebut dapat dikatakan kurang baik karena mencapai angka rata-rata 57,63%.

Tabel 6
Rasio Efisiensi Pajak Daerah

BULAN	2017	2018	2019
	Rasio Efisiensi Pajak Daerah	Rasio Efisiensi Pajak Daerah	Rasio Efisiensi Pajak Daerah
1	23.38%	27.53%	28.90%
2	10.21%	11.66%	14.00%
3	6.09%	6.47%	8.81%
4	6.83%	6.79%	1.13%
5	5.31%	5.45%	6.01%
6	4.46%	4.71%	4.86%
7	5.24%	5.65%	5.62%
8	4.25%	4.64%	4.59%
9	3.43%	3.62%	3.66%
10	5.13%	5.14%	5.28%
11	4.67%	4.68%	4.88%
12	4.12%	4.21%	4.47%
	6.93%	7.55%	7.69%
Rata – rata – 7,39%			

Berdasarkan tabel diatas, rasio efisiensi pajak daerah dianggap baik apabila presentase kurang dari 10%. Pada tahun 2017 sudah terjadi efisiensi untuk kinerja keuangan daerah dalam pemungutan pajak, ini terlihat dari rasio efisiensi pajak daerah yang mencapai 6,93%. Pada tahun 2018 Rasio efisiensi pajak daerah mengalami kenaikan menjadi 7,55%, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kurang baik. Tahun 2019 rasio efisiensi pajak daerah mengalami kenaikan lagi sebesar 7,69%. Secara umum, untuk rasio efisiensi pajak daerah dapat dikatakan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata - rata mencapai 7,39%.

Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Jika rasio ini menunjukkan angka diatas 0% maka dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tabel 7
Derajat Kontribusi BUMD

BULAN	2017	2018	2019
	Derajat Kontribusi BUMD	Derajat Kontribusi BUMD	Derajat Kontribusi BUMD
1	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	3.09%	0.45%
3	2.50%	2.19%	0.38%
4	2.96%	1.59%	1.84%
5	2.55%	1.30%	1.58%
6	2.08%	1.04%	1.36%
7	1.79%	0.95%	1.22%
8	1.62%	0.88%	1.06%
9	1.45%	0.78%	0.89%
10	1.30%	0.75%	0.81%
11	1.21%	0.70%	0.74%
12	1.11%	0.65%	0.69%
	1.55%	1.16%	0.92%
1.21%			

Berdasarkan perhitungan derajat kontribusi BUMD untuk pendapatan daerah secara umum mencapai angka 1,21% (total). Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 1,55%, sedangkan kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 0,92%. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa derajat kontribusi BUMD setiap tahunnya lebih dari 0%, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Analisis Varian Belanja

Analisis varian belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan baik dan efisien jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah

yang dianggarkan). Berikut ini adalah tabel perhitungan analisis varian belanja daerah Kota Surakarta tahun 2017-2019:

Tabel 8
Analisis Varian Belanja Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Bulan	Belanja				Rata2
		APBD	Realisasi	Selisih	Persentase Realisasi APBD	
2017	1	1,814,341,049,000	40,432,425,272	(1,773,908,623,728)	2.23%	35.49%
	2	1,814,341,049,000	105,458,526,495	(1,708,882,522,505)	5.81%	
	3	1,814,341,049,000	186,607,510,720	(1,627,733,538,280)	10.29%	
	4	1,814,341,049,000	255,451,374,098	(1,558,889,674,902)	14.08%	
	5	1,814,341,049,000	361,598,340,803	(1,452,742,708,197)	19.93%	
	6	1,814,341,049,000	568,039,290,539	(1,246,301,758,461)	31.31%	
	7	1,814,341,049,000	698,985,750,335	(1,115,355,298,665)	38.53%	
	8	1,814,341,049,000	819,389,880,568	(994,951,168,432)	45.16%	
	9	1,988,514,929,756	962,140,687,687	(1,026,374,242,069)	48.38%	
	10	1,988,514,929,756	1,096,665,257,591	(891,849,672,165)	55.15%	
	11	1,988,514,929,756	1,313,138,522,581	(675,376,407,175)	66.04%	
	12	1,988,514,929,756	1,768,345,963,065	(220,168,966,691)	88.93%	
2018	1	1,905,769,955,034	41,158,206,733	(1,864,611,748,301)	2.16%	35.85%
	2	1,905,769,955,034	97,105,843,096	(1,808,664,111,938)	5.10%	
	3	1,905,769,955,034	186,356,536,452	(1,719,413,418,582)	9.78%	
	4	1,905,769,955,034	264,340,610,364	(1,641,429,344,670)	13.87%	
	5	1,905,769,955,034	388,724,323,486	(1,517,045,631,548)	20.40%	
	6	1,905,769,955,034	546,757,400,644	(1,359,012,554,390)	28.69%	
	7	1,905,769,955,034	714,264,006,959	(1,191,505,948,075)	37.48%	
	8	1,905,769,955,034	848,011,075,308	(1,057,758,879,726)	44.50%	
	9	2,091,964,585,155	1,035,472,624,320	(1,056,491,960,835)	49.50%	
	10	2,091,964,585,155	1,201,213,033,633	(890,751,551,522)	57.42%	
	11	2,091,964,585,155	1,460,691,577,425	(631,273,007,730)	69.82%	
	12	2,091,964,585,155	1,914,818,394,396	(177,146,190,759)	91.53%	
2019	1	2,001,997,784,000	41,847,968,349	(1,960,149,815,651)	2.09%	40.80%
	2	2,001,997,784,000	105,103,787,224	(1,896,893,996,776)	5.25%	
	3	2,001,997,784,000	191,417,402,963	(1,810,580,381,037)	9.56%	
	4	2,001,997,784,000	290,329,312,296	(1,711,668,471,704)	14.50%	
	5	2,001,997,784,000	559,954,793,393	(1,442,042,990,607)	27.97%	
	6	2,001,997,784,000	684,229,025,662	(1,317,768,758,338)	34.18%	
	7	2,001,997,784,000	884,573,118,145	(1,117,424,665,855)	44.18%	
	8	2,001,997,784,000	1,012,403,467,401	(989,594,316,599)	50.57%	
	9	2,001,997,784,000	1,185,305,126,913	(816,692,657,087)	59.21%	
	10	2,001,997,784,000	1,375,705,098,070	(626,292,685,930)	68.72%	
	11	2,001,997,784,000	1,617,985,748,494	(384,012,035,506)	80.82%	
	12	2,174,261,668,803	2,012,408,112,863	(161,853,555,940)	92.56%	

Berdasarkan tabel diatas, analisis varian belanja daerah selama tahun 2017-2019 terlihat realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja. Kinerja keuangan kota Surakarta dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata – rata persentase

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017, 2018, dan 2019 mencapai 35,49%, 35,85% dan 40,80%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 40,80%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 35,49%.

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2017 – 2019

Tabel 9

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Belanja	Bulan	Realisasi Belanja 2017	Realisasi Belanja 2018	Realisasi Belanja 2019	Persentase Pertumbuhan	Rata2
Operasi	1	40,432,425,272	41,158,206,733	41,699,359,599	1.31%	10.11 %
	2	98,000,812,195	96,126,573,196	104,603,133,549	8.82%	
	3	176,208,288,739	183,100,450,798	189,528,632,483	3.51%	
	4	242,492,524,857	259,244,850,170	286,938,216,871	10.68%	
	5	336,781,412,914	375,395,877,525	459,450,434,577	22.39%	
	6	518,302,701,676	514,728,961,490	575,629,916,315	11.83%	
	7	626,271,640,728	661,793,966,022	745,694,336,931	12.68%	
	8	713,789,825,053	749,305,652,309	848,168,022,358	13.19%	
	9	826,662,215,106	862,930,266,724	971,781,412,420	12.61%	
	10	911,807,714,155	992,335,513,921	1,095,812,757,629	10.43%	
	11	1,071,148,311,023	1,154,226,133,489	1,249,043,896,589	8.21%	
	12	1,298,758,722,426	1,391,048,076,243	1,468,829,935,943	5.59%	
Modal	1	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.15 %
	2	7,457,714,300	979,269,900	500,653,675	-48.87%	
	3	10,399,221,981	3,256,085,654	1,888,770,480	-41.99%	
	4	12,958,849,241	5,095,760,194	3,391,095,425	-33.45%	
	5	24,816,927,889	13,328,445,961	100,504,358,816	654.06%	
	6	49,736,588,863	32,028,439,154	108,599,109,347	239.07%	
	7	72,714,109,607	52,470,040,937	138,878,781,214	164.68%	
	8	105,600,055,515	98,705,422,999	164,235,445,043	66.39%	
	9	135,478,472,581	172,542,357,596	213,523,714,493	23.75%	
	10	184,857,543,436	208,879,519,712	279,892,340,441	34.00%	
	11	241,990,211,558	306,465,443,936	368,941,851,905	20.39%	
	12	469,587,240,639	523,770,318,153	543,578,176,920	3.78%	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas belanja operasi dan belanja modal mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,11% dan 90,15%.

Efisiensi Belanja

Berikut ini merupakan tabel perhitungan untuk analisis efisiensi belanja daerah kota urakarta tahun 2017:

Tabel 10
Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2017

No	Rasio Efisiensi Belanja (2017)	Rasio Efisiensi Belanja (2018)	Rasio Efisiensi Belanja (2019)
1	2.23%	2.16%	2.09%
2	5.81%	5.10%	5.25%
3	10.29%	9.78%	9.56%
4	14.08%	13.87%	14.50%
5	19.93%	20.40%	27.97%
6	31.31%	28.69%	34.18%
7	38.53%	37.48%	44.18%
8	45.16%	44.50%	50.57%
9	48.38%	49.50%	59.21%
10	55.15%	57.42%	68.72%
11	66.04%	69.82%	80.82%
12	88.93%	91.53%	92.56%
	35.49%	35.85%	40.80%

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kota Surakarta telah efisien dalam penggunaan anggaran belanja. Rata-rata efisiensi belanjanya adalah 37,38%. Rasio ini masih dibawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah kota Surakarta telah mampu melakukan efisiensi belanja tahun 2017 – 2019.

PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan pendapatan kota Surakarta periode 2017-2019:

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis varians pendapatan dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan), Mahmudi, 2010. Analisis varian secara umum menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah kota Surakarta dikatakan baik yaitu sebesar 54,32%, karena mengalami selisih lebih. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:137).

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan kinerja keuangan pendapatan cenderung meningkat jika mengalami pertumbuhan secara positif, sedangkan dikatakan mengalami penurunan jika mengalami pertumbuhan negative (Mahmudi, 2010). Analisis pertumbuhan pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 0,23%. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010: 138) bahwa jika terjadi pertumbuhan yang positif maka menunjukkan terjadi peningkatan kinerja keuangan pendapatan. Peningkatan positif ini memang tidak terlalu tinggi.

c. Analisis rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan pendapatan daerah menunjukkan secara umum kinerja keuangan pendapatan kota Surakarta berdasarkan:

1) Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi berada diatas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi, hal ini sesuai dengan artikel yang diterbitkan Kementrian Keuangan (2011). Serajat Desentralisasi kota Surakarta menunjukkan angka rata-rata 23,96% sehingga dapat dikatakan rendah. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:142) semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam artikel kementrian keuangan (2011) menjelaskan jika rasio ketergantungan keuangan daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Rasio ketergantungan keuangan daerah kota Surakarta menunjukkan angka rata – rata sebesar 67,24%. Hal ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:142) bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah kota terhadap pemerintah pusat.

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 %, sedangkan rasio efisiensi pajak dikatakan baik jika kurang dari 10%. Rata – rata rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah periode 2017-2019 menunjukkan pemerintah kota Surakarta telah melakukan efektivitas pajak, Rasio efektivitas pemerintah daerah kota Surakarta secara umum menunjukkan 57,63%. Pemerintah kota Surakarta pada tiga tahun ini sudah efisien dalam pemungutan pajak karena secara umum pemerintah kota Surakarta menunjukkan angka rata – rata dibawah 10% yaitu 7,39% untuk rasio efisiensi.

4) Derajat Kontribusi BUMD

Jika dilihat dari derajat kontribusi BUMD, perusahaan daerah dikatakan telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah jika rasio ini menunjukkan angka diatas 0%. Derajat kontribusi BUMD kota Surakarta menunjukkan angka rata – rata lebih dari 0% yaitu 1,31%. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD yang ada di kota Surakarta telah memiliki kontribusi terhadap besarnya pendapatan daerah kota Surakarta.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa, secara umum kinerja keuangan pendapatan daerah kota Surakarta dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta selama periode 2017 – 2019 yang meliputi:

a. Analisis Varians Belanja daerah

Jika analisis varians belanja daerah ada selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan mempunyai kinerja yang tidak baik, sedangkan jika ada selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja

dikatakan baik (Mahmudi, 2010). Analisis varians belanja daerah kota Surakarta secara umum dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada realisasi belanja yang melebihi anggaran dimana rata-ratanya 37,38%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:157) yaitu pemerintah daerah dikatakan mempunyai kinerja keuangan belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Kenaikan belanja daerah dikatakan wajar atau tidak perlu melihat inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan layanan, penyesuaian faktor makro ekonomi dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relative terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Secara umum analisis pertumbuhan belanja daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja kota Surakarta mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan positif 96,15%.

c. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Kinerja pemerintah daerah dilihat dari analisis efisiensi belanja daerah, dikatakan melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Analisis efisiensi belanja daerah menunjukkan kota Surakarta telah melakukan efisiensi belanja untuk periode 2017-2019. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja kota Surakarta yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja yaitu 37,38%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran.

KESIMPULAN

Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

- a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dilihat dari varians pendapatan daerah kota Surakarta selama 2017-2019, secara umum dapat dikatakan baik.
- b. Kinerja keuangan pendapatan daerah kota Surakarta dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah kota Surakarta selama tahun 2017-2019, secara umum mengalami penurunan kinerja keuangan pendapatan.
- c. Kinerja keuangan pendapatan daerah kota Surakarta dilihat dari rasio keuangan pendapatan daerah kota Surakarta selama tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Kota Surakarta dapat dikatakan tinggi.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil kinerja keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara belanja operasional dengan belanja modal.

- a. Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari varians belanja daerah kota Surakarta selama tahun 2017-2019, secara umum dapat dikatakan baik.
- b. Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari pertumbuhan belanja daerah selama tahun 2017-2019 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif.

- c. Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari keserasian belanja daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal.
- d. Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari efisiensi belanja daerah, realisasi anggaran belanja pemerintah kota Surakarta tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Daling, Marchelino.(2013). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Halim, Abdul dan Mohammad Iqbal,.(2012). *Pengelolaan Keuangan Negara*. Bulak Sumur.NPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Marizka.(2010). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nordian, Deddi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia.(2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*. Jakarta.
- Selly Paat.(2013). *Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Pemerintah Kota Manado*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Soimah. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Solopos. (2012). "Belanja Pegawai Presentase Belanja Pegawai di Klaten Nomor1 di Jateng". Diambil dari <http://www.solopos.com/2012/04/12/belanjapegawai-presentase-belanja-pegawai-di-klaten-nomor-1-di-jateng-177867> (Diakses pada tanggal 6 November 2020).
- Subramanyam dan John J. Wild. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung